

PATOLOGI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM EFEKTIFITAS PELAYANAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

Chandra Jaka Buana¹, Evi Priyanti²

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
email: 1910631180147@student.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yang dianalisis secara deskriptif melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi lapangan, teknik wawancara dengan pedoman wawancara sesuai teori yang diunakan serta pengambilan dokumentasi dan video. penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang terdapat Patologi birokrasi dalam program BPNT sehingga Untuk mengetahui efektivitas pelayanannya digunakan teori Efektivitas menurut Gibson (1996: 28) yang mengemukakan bahwa Efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan. Sehingga didapat kesimpulan saran atau solusi dari pernyataan informan sesuai fenomena program BPNT yang terjadi di Kecamatan Lemahabang.

Kata Kunci: Patologi, Birokrasi, Efektivitas, Pelayanan, BPNT

Abstract

This research on the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) uses a qualitative approach using a case study method which is analyzed through data collection carried out by field observations, interview techniques with interview guidelines according to the theory used as well as documentation and video retrieval. Lemahabang, Karawang Regency, West Java where there is a pathology in the BPNT program so that to determine the effectiveness of its services, effectiveness is used according to Gibson (1996: 28) who suggests that effectiveness in the context of relationship behavior is optimal between production, quality, efficiency, flexibility, satisfaction, excellence, and development. So that conclusions or solutions are obtained from the statement in accordance with the phenomenon of the BPNT program that occurred in Lemahabang District.

Keywords: Pathology, Bureaucracy, Effectiveness, Service, BPNT

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam memberikan Perlindungan sosial pada masyarakat melalui program bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan warga suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan minimnya lapangan kerja. ketidak demokratisan juga bisa menjadi faktor Kemiskinan, karena demokrasi selalu mementingkan rakyat namun dengan banyaknya kemiskinan pemerintah dilihat tidak memprioritaskan rakyatnya, hal tersebut juga mencerminkan hubungan kekuasaan serta menghilangkan kemampuan warga negara dalam memutuskan setiap masalah yang menjadi pusat perhatian mereka sendiri, sehingga masyarakat yang mayoritas penduduknya kurang memperoleh lahan dan alat-alat teknologi serta sumberdaya seperti pendidikan, kredit, penggunaan teknologi, serta akses pasar menjadi salah satu keterbelakangan dan menimbulkan kemiskinan. Adapun penyebab lain dari kemiskinan diakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kesehatan fisik yang memprihatinkan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta hidup dalam lingkungan yang sulit mendapatkan pekerjaan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui program Jaminan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan reformasi dari Program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program

Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT ini. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras saja tetapi pangan lainnya seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Sesuai Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai BAB I pasal (1) dan (4), “Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan”. Dan sesuai Pasal 19 bahwa Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; b. Bank Penyalur; c. kementerian/lembaga terkait; d. pemerintah daerah provinsi; dan/atau e. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Namun tentu dalam setiap program yang telah direncanakan sematang mungkin pasti memiliki kendala dan hal tersebutlah yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk terus memperbaiki dan mencari solusi dalam menangani suatu masalah. Begitupun pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini masalah yang muncul diantaranya terhentinya bantuan pada KPM padahal mereka masih memiliki kartu dan persyaratan lainnya yang seharusnya bisa mendapatkan bantuan tersebut, kemudian ketidak sinkronan datalah yang menyebabkan terhentinya bantuan. Dan selalu ditemukan ketidaktepat sasaran KPM yang disebabkan tidak memahami dan tidak disesuaikan kriteria dan syarat yang seharusnya menerima bantuan tersebut. oleh karena itu untuk mengetahui masalah serta solusi seperti apa yang dapat ditawarkan, kami melakukan observasi dan wawancara dengan menggunakan teori Efektivitas Menurut Gibson (1996: 28) yang mengemukakan bahwa

“Efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan”. pada Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dengan judul makalah “Patologi Birokrasi Pemerintah Dalam Efektivitas Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Talagamulya”

METODE

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang didapatkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan sehingga sesuai fenomena sosial. Dengan menggunakan metode studi kasus, dianalisis secara sifat deskriptif. Adapun dalam pengumpulan data dilakukan observasi ke lapangan, Kemudian menggunakan teknik Wawancara dengan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara, pengumpulan dokumentasi foto dan video. Teknik dan cara ini diperlukan guna mengetahui keadaan dilapangan, masalah apakah yang sekiranya layak dan penting untuk diteliti sehingga diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar dan sistematis. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Menurut Gibson (1996: 28) dimana adanya 9 variabel yang mengemukakan bahwa “Efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan”.

Produksi Pendistribusian barang BPNT di Kecamatan Lemahabang

Kecamatan Lemahabang ini Jika ditemukan adanya produk barang yang mengalami kerusakan atau bahan pangan yang busuk sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat, namun demikian hal tersebut bisa dilakukan penukaran produk yang lebih baik lagi sebelum di distribusikan pada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat. Berbeda dengan pernyataan dari salah satu warga, bahwa ia

sama sekali tidak mengerti dan mengetahui mengenai program BPNT ini yang dimana programnya berupa bantuan pangan seperti telur, beras, kacang, daging, kacang dan sayur, padahal jika dilihat dari segi ekonomi atau kriteria penerima KPM ia sangat berhak mendapatkan seperti mengacu dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kriteria orang miskin yang berjumlah 14 kriteria meliputi luas rumah nya sangatlah terbatas untuk ia yang memiliki tanggungan anak dan orangtua yang sudah renta bahkan seorang janda, lantai yang masih tanah, rumah yang sudah bobok, dinding rumah yang menggunakan kayu, fasilitas toilet juga terlihat kumuh, sumber penerangan utama atau listrik yang hanya terbatas, sumber air minum masih dimasak sendiri, masak bahan bakar sudah menggunakan kompor gas, dalam makan daging/ikan/telur tidak selama seminggu, membeli pakaian minimal setahun sekali, makan sehari dua kali di prioritaskan untuk anak dan orangtua yang sudah renta, masih sulit pergi ke Puskesmas, pendapatan untuk pekerjaan sangatlah terbatas, pendidikan dan aset sangat rendah.

Pendistribusian barang BPNT di Kecamatan Lemahabang

Dilihat dari kualitas produk ada saja barang yang datang mengalami kerusakan atau busuk akibat dalam perjalanan, kemudian dari segi kualitas pelayanan program BPNT ternyata belumlah sepenuhnya efektif sehingga dalam pendistribusian produk serta kualitas program BPNT yang seharusnya bisa tersampaikan pada warga yang sesuai kriteria penerima KPM, namun di Kecamatan Lemahabang ini bukan hanya tidak tersampaikan tetapi juga tidak mengetahui mengenai program BPNT. Patologi yang ditemukan dalam program BPNT untuk menganalisis efektivitas dilihat pada aspek produksi dan kualitas, yang merupakan bagian dari teori efektivitas. Seperti yang kita ketahui bahwa BPNT ini merupakan program Bantuan Pangan Non Tunai, artinya pada pelaksanaan di lapangan akan selalu ditemukan adanya produk atau barang yang sampai memiliki kualitas yang buruk akibat pengiriman dalam perjalanan.

Efisiensi dan Fleksibilitas dalam Verifikasi Kembali Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Mencapai efektivitas aspek efisiensi dan fleksibilitas dalam suatu program merupakan hal yang penting. dilihat dari Permasalahan ketidaktepat sasaran dalam sebuah bantuan sosial salah satunya hampir dilatarbelakangi oleh kesalahan data masyarakat, begitupun program BPNT yang dimana masyarakat di Kecamatan Lemahabang banyak mengeluhkan permasalahan yang dilatarbelakangi karena adanya kesalahan pada data. BPNT ini menggunakan mekanisme akun elektronik yang setiap per KPM memiliki kartu yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E Warung yang bekerjasama antara pemerintah dengan bank. kartu Seperti saldo kosong padahal warga tersebut dalam data pemerintah telah terdaftar, namun akibat ketidaksesuaian dengan data di Bank akhirnya dana warga tidak keluar atau saldo kosong. Maka perlu adanya Verifikasi kembali data warga yang tidak sesuai.

Dalam program BPNT di Kecamatan Lemahabang ini masih dikatakan belum tercapainya efektivitas dan fleksibilitas. Karena masih sulitnya melakukan verifikasi ulang data masyarakat yang mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan pemerintah dan pihak bank, hal tersebut dikarenakan suatu kondisi atau nasib masyarakat yang dinamis, walaupun demikian pemerintah Kecamatan Lemahabang selalu mengusahakan pengumpulan kembali data masyarakat untuk diverifikasi ulang.

Kemudian disisi lain saat di lapangan seringkali terjadi masyarakat yang bersikeras menginginkan sebagai penerima KPM, dan pemerintah Lemahabang untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas selalu menjalankan prosedur seperti melakukan Musyawarah desa dan surat pernyataan. Demikian menurut pemilik warung yang dipercayai aparat pemerintah untuk menyalurkan barang dari program BPNT ini disamping terkendalanya system data yang masih belum efisien dan fleksibel namun dalam sistem penyaluran melalui E-warung dinilai bisa lebih efisien dan fleksibel dalam penyaluran langsung pada masyarakat sehingga mudah terkoordinir.

Namun berbeda halnya dengan salah satu warga di Kecamatan Lemahabang, yang secara kriteria sebenarnya berhak mendapatkan bantuan sebagai KPM, dan masih banyak warga yang tidak mengetahui dan paham mengenai bantuan sosial ini, mereka hanya diperintahkan hingga beberapa kali untuk mengumpulkan persyaratan tetapi tidak dijelaskan secara rinci untuk bantuan sosial yang bagaimana dan seperti apa, sehingga program BPNT belum mencapai efisien dan fleksibilitas dalam memferivikasi data dan pelayanan memberikan informasi bagi mereka yang memang berhak mendapatkan.

Kepuasan dalam Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Lemahabang

Suatu Program atau kebijakan publik dikatakan telah mencapai Efektivitas jika telah mencapai kepuasan pada masyarakat, dalam Program BPNT di Kecamatan Lemahabang sering terjadinya pengaduan, seperti masyarakat yang saldonya kosong selama berbulan-bulan tidak mendapatkan bantuan karena permasalahan ketidaksesuaian data antara pemerintah dan pihak bank, kemudian pemblokiran PIN pada masyarakat, dan permasalahannya juga dalam proses pengurusan oleh aparat pemerintah di Lemahabang yang dimana untuk melakukan pengajuan atau membetulkan permasalahan pada masyarakat harus melakukan perjalanan ke kota karena di Lemahabang tidak ada bank yang bekerjasama dengan pemerintah pada program BPNT tersebut.

Disamping itu juga sering terdengar permasalahan dimasyarakat walaupun tidak datang langsung ke kantor kecamatan ataupun desa, masih ada beberapa diantara masyarakat yang tidak mampu atau kriteria masyarakat miskin dan tidak menjadi penerima KPM karena melalaikan dalam melakukan proses pembuatan EKTP dan KK, padahal itu merupakan persyaratan dasar seseorang bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga masyarakat Seringkali mengadukan permasalahannya kepada pihak penyalur atau Ewarung, padahal pihak E-warung bukan ranahnya melakukan pengurusan data atau kendala lainnya sehingga pihak Ewarung perlu mengkomunikasikan dengan baik bahwa permasalahan tersebut seharusnya diadakan pada aparat pemerintah seperti di Kecamatan atau Desa.

Banyak diantara masyarakat yang mengeluhkan karena dinilai tidak adil dan belum tepat sasaran karena menurut masyarakat di Kecamatan Lemahabang masih banyak RT RW yang tidak bertanggungjawab dan adil sehingga Keluarga Penerima Manfaat atau KPM tersebut hanya didapatkan oleh kerabat terdekat dari RT RW nya saja tanpa dilihat dari kriteria penerima KPM, Walaupun demikian masyarakat tidak pernah mengadukan atau membuat laporan kantor kecamatan maupun desa karena secara kriteria seharusnya berhak mendapatkan.

Keunggulan Aparat Pemerintah Kecamatan Lemahabang dalam Program BPNT Mengetahui dan Memahami Kriteria dan Syarat Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Dalam kriteria penerima KPM program BPNT ini mengacu dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) seperti tentang kriteria orang miskin yang berjumlah 14 kriteria meliputi luas rumah, lantai, rumah, dinding rumah, fasilitas toilet, sumber penerangan utama, sumber air minum, masak bahan bakar, makan daging/ikan/telur selama seminggu, membeli pakaian minimal setahun sekali, makan frekuensi, mampu pergi ke Puskesmas, pendapatan untuk pekerjaan, pendidikan dan aset. hal tersebut secara singkat telah diketahui oleh Aparat Pemerintah di Kecamatan Lemahabang walaupun yang disampaikan bukanlah sesuai atau tidak mengacu pada BPS, mereka hanya menyatakan “untuk kriteria kemiskinan itu dilihat dari penghasilan perhari atau perbulan kira-kira cukup tidak untuk makan sehari-hari, kemudian punya tanggungan atau tidak, dan dilihat dari fisik rumahnya bagus atau tidak”.

Kepala Kecamatan Lemahabang dan Koordinator bansos sebenarnya mengetahui masih banyak warga di Kecamatan Lemahabang sebagai penerima KPM tetapi tidak sesuai kriteria. Karena sulitnya memverifikasi data masyarakat kendala pada sumber daya manusianya dan keadaan masyarakat yang dinamis yang seharusnya sering mengawasi perubahan status sosial penerima KPM di Kecamatan Lemahabang.

Pengembangan untuk Mengatasi Masalah Penyaluran BPNT

Permasalahan yang paling sering ditemukan yaitu mengenai data, padahal data merupakan dasar penunjang ketepatasarannya program BPNT, kemudian disesuaikan kriteria untuk menciptakan program yang tepat sasaran sesuai kriteria penerima KPM hingga sosialisasi yang lebih baik lagi mengenai pembuatan EKTP dan KK agar masyarakat yang tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan ini akibat tidak ada EKTP dan KK bisa mendapatkan bantuan ini. Harapan besar masyarakat program ini bisa tepat sasaran dan pihak RT dan RW yang kurang adil sehingga adanya budaya nepotisme yang masih mengakar di masyarakat untuk mementingkan kerabat terdekatnya padahal pada kenyataannya tidak sesuai kriteria penerima KPM.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; dalam Produksi dan Kualitas program BPNT di Kecamatan Lemahabang pada pelaksanaan di lapangan akan selalu ditemukan adanya produk atau barang yang sampai di penyalur atau E-warung yang memiliki kualitas buruk akibat pengiriman dalam perjalanan. Namun dengan begitu Koordinator BPNT di kecamatan lemahabang mengupayakan dilakukannya pengecekan ulang dilihat dari kualitas dan kuantitas jika ada yang tidak sesuai maka ditukar terlebih dahulu sebelum didistribusikan pada

masyarakat. Kemudian tidak ditemukannya penyelewengan ketidak sesuaian harga dengan barang atau produk yang diberikan kepada masyarakat karena semuanya telah diperhitungkan dari pusat bahwa dengan uang sebesar Rp. 200.000.00 itu telah ditentukan untuk mendapatkan barang sesuai pengiriman dari pusat oleh suplayer. Namun mengenai pelayanan program dari produk dan kualitas BPNT ini belumlah secara merata diketahui masyarakat khususnya yang memang dari segi ekonomi atau kriteria penerima KPM ia sangat berhak mendapatkan. sehingga dilihat dari produk dan kualitas pelayanan program BPNT ternyata belumlah sepenuhnya efektif tepat sasaran di Kecamatan Lamahabang. Dalam Efisiensi dan Fleksibilitas pelayanan program BPNT di Kecamatan Lamahabang belum sepenuhnya mencapai efisiensi dan fleksibilitas karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan permasalahan yang dilatarbelakangi karena adanya kesalahan pada data sehingga terjadinya permasalahan saldo kosong, Hal tersebut juga karena data masyarakat mengalami perubahan atau ketidak sesuaian dengan pemerintah dan pihak bank, perubahan tersebut dikarenakan suatu kondisi atau nasib masyarakat yang dinamis, walaupun demikian pemerintah Kecamatan Lamahabang selalu mengusahakan pengumpulan kembali data masyarakat untuk diverifikasi ulang. Dalam Kepuasan, suatu Program atau kebijakan publik dikatakan telah mencapai Efektivitas jika telah mencapai kepuasan pada masyarakat, dalam pelayanan Program BPNT di Kecamatan Lamahabang ini masih sering terjadinya pengaduan pada Aparat Kecamatan Lamahabang mengenai permasalahan Saldo Kosong. Kemudian Banyak diantara masyarakat yang mengeluhkan karena dinilai tidak adil dan belum tepat sasaran, namun tidak pernah mengadukan atau membuat laporan ke kantor kecamatan maupun desa. Keunggulan aparat pemerintah pada program BPNT ini dilihat pada pemahamannya mengenai kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan pahamnya hal tersebut aparat pemerintah mampu mengatasi permasalahan ketidaksesuaian kriteria KPM. Aparat pemerintah di Kecamatan Lamahabang juga sangat teliti jika ada masyarakat yang mengajukan sebagai KPM, maka aparat pemerintah di Kecamatan Lamahabang selalu memerintahkan melakukan Musdes (Musyawarah desa) sebagai syarat apakah layak sebagai penerima atau tidak. Namun yang menjadi permasalahan adalah aparat yang terjun langsung pada masyarakat, yang tidak memahami kriteria penerima KPM, sehingga banyak diantara RT/RW di Kecamatan Lamahabang yang hanya pada kerabat terdekatnya saja dengan pengajuan atau syarat yang tanpa diperiksa kembali.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya maka penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, dosen yang telah membimbing, serta semua pihak yang mendukung dan terlibat dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhalifi Yuris, Zumarniansyah A, Dkk.2020. "Comparison Of Naive Bayes Algorithm and C.45 Algorithm in Classification Of Poor Communities Receiving Non Cash Food Assistance In Wanasari Village Karawang Regency".Jurnal TECHNO Nusa Mandiri Vol.17, No.1 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
- Gibson,L.J. dkk, 2000, Organisasi, Terjemahan, Jakarta, Erlangga
- Kecamatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- Kemensos.go.id. 2019. Kemensos dan Perum Bulog Bersinergi Menyalurkan BPNT.
- Kementerian Sosial, & dkk. 2017. Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai
- Kementerian Sosial, & Dkk. 2019. Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Kepegawaian Daerah Provinsi Riau | Bahagia Berkarya Pemerintahan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
- Khoiriyah siti, Ngarsiningtyas, Dkk.2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa . Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4 (2) (2016): 161-175.
- Ma'ruf, Mu'min. 2010. "Patologi Birokrasi." Jurnal Visioner. Vol 4 NO 3.
- Pelayanan Publik " Apa dan mengapa Ada Pelayanan Publik ? " - Badan Profile Lamahabang | Situs Resmi - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (karawangkab.go.id)
- Wikipedia.org.
- Ramadhanti, Rika. 2018. "Politik dan Birokrasi Pemerintahan." Jurnal Trias Politika 2.1 : 96-10